RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

(RENJA)

OPD KECAMATAN WILANGAN

TAHUN 2023



KECAMATAN WILANGAN

KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadlirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat, karunianya, telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wilangan Tahun 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten NganjukTahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2023 merupakan tahun Pertama Rencana Pencapaian Target Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wilangan Tahun 2018-2023. Renja Kecamatan Wilangan Tahun 2023 menjadi dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lain yang dimiliki oleh setiap SKPD. Dokumen Renja Kecamatan Wilangan tahun 2023 berisi 4 (empat) Bab yang meliputi : Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2023, Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Bab IV Penutup.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wilangan didasarkan pada kondisi target menurut Renstra Kecamatan Wilangan dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk satu tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran program dan kinerja kegiatan pada tahun 2023.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renja Kecamatan Wilangan Tahun 2023.

Wilangan, 23 Juni 2022

CAMAT WILANGAN

SUTOMO. S.Sos, MM.

Pembina

NIP. 19740802 199803 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2023 Dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wilangan

2.2.1 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

2.2.2 Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

2.2.3 Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Wilangan

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WILANGAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Wilangan

3.2.1 Program Dan Kegiatan

3.2.1.1 Program

3.2.1.2 Kegiatan

3.3. Program Kegiatan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGADAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Matrik Usulan Program Dan Kegiatan Tahun 2023

BAB V PENUTUP

5.1. Saran

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN XLIX
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/49/K/411.012/2022
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WILANGANKABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

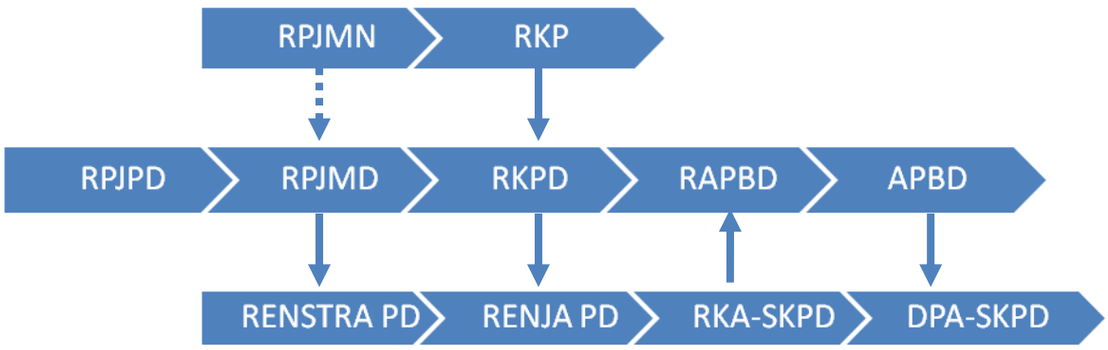
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerahdigunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalamperencanaan program, kegiatan maupun perencanaankebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada tahun ke-5(ke-lima) periode tahun 2023; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
2.1. EvaluasiPelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. AnalisisKinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melaluicapain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

(Target BerdasarkanPerubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.01	**KECAMATAN**				**2,744,902,050**	**2,377,148,388**	**86.60%**			
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah pelaporan kinaerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**98%**	**37.57%**	**2,272,229,750**	**1,957,934,459**	**86.17%**	100%	**37.57%**	**38.34%**
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	98%	39.40%	2,000,000	1,958,000	97.90%	100%	39.40%	40.20%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5 Laporan	39.40%	2,000,000	1,958,000	97.90%	5 laporan	39.40%	

		Kinerja SKPD								
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di susun	98%	37.21%	1,990,449,000	1,684,812,373	84.64%	100%	37.21%	37.97%
7.01.01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	37.21%	1,987,449,000	1,681,839,873	84.62%	14 orang/bulan	37.21%	
7.01.01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.82%	2,000,000	1,987,500	99.38%	1 laporan	39.82%	
7.01.01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	39.72%	1,000,000	985,000	98.50%	2 laporan	39.72%	
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98%	24.28%	2,405,000	2,405,000	100.00%	100%	24.28%	24.78%
7.01.01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Pegawai	24.28%	2,405,000	2,405,000	100.00%	13 Pegawai	24.28%	

7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	99%	28.82%	75,630,150	73,603,602	97.32%	100%	28.82%	29.11%
7.01.01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.68%	982.400	982,000	99.96%	1 paket	30.68%	
7.01.01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.83%	28,477,500	28,453,600	99.92%	5 paket	31.83%	
7.01.01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.06%	2,000,250	1,998,300	99.90%	2 paket	26.06%	
7.01.01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	32.00%	2,500,000	2,500,000	100.00%	2 dokumen	32.00%	
7.01.01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	25.98%	41,670,000	39,669,702	95.20%	10 laporan	25.98%	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99%	43.69%	38,645,100	38,095,200	98.58%	100%	43.69%	44.13%
7.01.01. 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	19.50%	8,529,300	8,291,700	97.21%	3 paket	19.50%	
7.01.01. 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	66.73%	30,115,800	29,803,500	98.96%	3 unit	66.73%	

7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99%	34.88%	30,124,000	27,164,895	90.18%	100%	34.88%	35.23%
7.01.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	27.28%	5,720,000	4,670,000	81.64%	2 laporan	27.28%	
7.01.01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36.22%	24,404,000	22,494,895	92.18%	36 laporan	36.22%	
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99%	52.67%	132,976,500	129,895,389	97.68%	100%	52.67%	53.20%
7.01.01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	46.30%	25,680,300	24,392,003	94.98%	4 unit	46.30%	
7.01.01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	46.67%	3,500,000	3,500,000	100.00%	5 unit	46.67%	
7.01.01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	50.02%	9,320,000	9,320,000	100.00%	6 unit	50.02%	
7.01.01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	55.26%	94,476,200	92,683,386	98.10%	4 unit	55.26%	
7. 01. 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Tingkat efektifitas koordinasi**	**99%**	**51.14%**	**128,635,100**	**126,033,469**	**97.98%**	**92%**	**51.14%**	**51.66%**

	PELAYANAN PUBLIK	**penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**								
7.01.02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99%	42.08%	74,249,500	72,160,938	97.19%	92%	42.08%	42.51%
7.01.02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	42.08%	74,249,500	72,160,938	97.19%	5 laporan	42.08%	
7.01.02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	30.24%	13,537,800	13,527,800	99.93%	92%	30.24%	30.24%
7.01.02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	30.24%	13,537,800	13,527,800	99.93%	2 dokumen	30.24%	
7.01.02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainnya Peaksanaan Urusan Pemerintahan	100%	183.89%	40,847,800	40,344,731	98.77%	92%	183.89%	183.89%
7.01.02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Non	3 Laporan	183.89%	40,847,800	40,344,731	98.77%	3 laporan	183.89%	

	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan								
7. 01. 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan**	**99%**	**147.49%**	**62,661,300**	**59,956,140**	**95.68%**	**100%**	**147.49%**	**148.98%**
7.01.03 2. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	99%	147.49%	62,661,300	59,956,140	95.68%	100%	147.49%	148.98%
7.01.03 2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat daam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasayarakatan	36.06%	20,217,900	19,929,500	98.57%	7 lembaga kemasayarakatan	36.06%	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi program kerja dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	389.07%	42,443,400	40,026,640	94.31%	2 dokumen	389.07%	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**99%**	**35.30%**	**22,872,800**	**21,717,600**	**94.95%**	**92%**	**35.30%**	**35.66%**
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	99%	35.30%	22,872,800	21,717,600	94.95%	92%	35.30%	35.66%

7.01.04 2.01 01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	35.30%	22,872,800	21,717,600	94.95%	3 laporan	35.30%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**100%**	**47.71%**	**22,890,100**	**22,745,400**	**99.37%**	**92%**	**47.71%**	**47.71%**
7.01.05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	JumlahPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	47.71%	22,890,100	22,745,400	99.37%	92%	47.71%	47.71%
7.01.05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	100 Orang	47.71%	22,890,100	22,745,400	99.37%	100 orang	47.71%	

		Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan**	**100%**	**271.61%**	**235,613,000**	**188,761,320**	**80.11%**	**100%**	**271.61%**	**271.61%**
7.01.06 2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	271.61%	235,613,000	188,761,320	80.11%	100%	271.61%	271.61%
7.01.06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	686.02%	216,203,000	169,790,320	78.53%	7 dokumen	686.02%	
7.01.06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	26.83%	6,930,000	6,640,000	95.82%	2 dokumen	26.83%	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	64.29%	12,480,000	12,331,000	98.81%	3 dokumen	64.29%	

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.34%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pengurangan dana anggaran akibat COVID-19.	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Memaksimalkan anggaran yang ada.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	51.66%	Rendah

Pelayanan Publik		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pengurangan dana anggaran akibat COVID-19.	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Memaksimalkan anggaran yang ada.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	148.98%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
-	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	35.66%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pengurangan dana anggaran akibat COVID-19.	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Memaksimalkan anggaran yang ada.
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	47.71%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pengurangan dana anggaran akibat COVID-19.	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Memaksimalkan anggaran yang ada.
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	271.61%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pengurangan dana anggaran akibat COVID-	Terdapat risiko kurang tercapainya target	Memaksimalkan anggaran yang

19.	kinerja	ada.

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci(IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sertaIndikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)*dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wilangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Wilangan.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

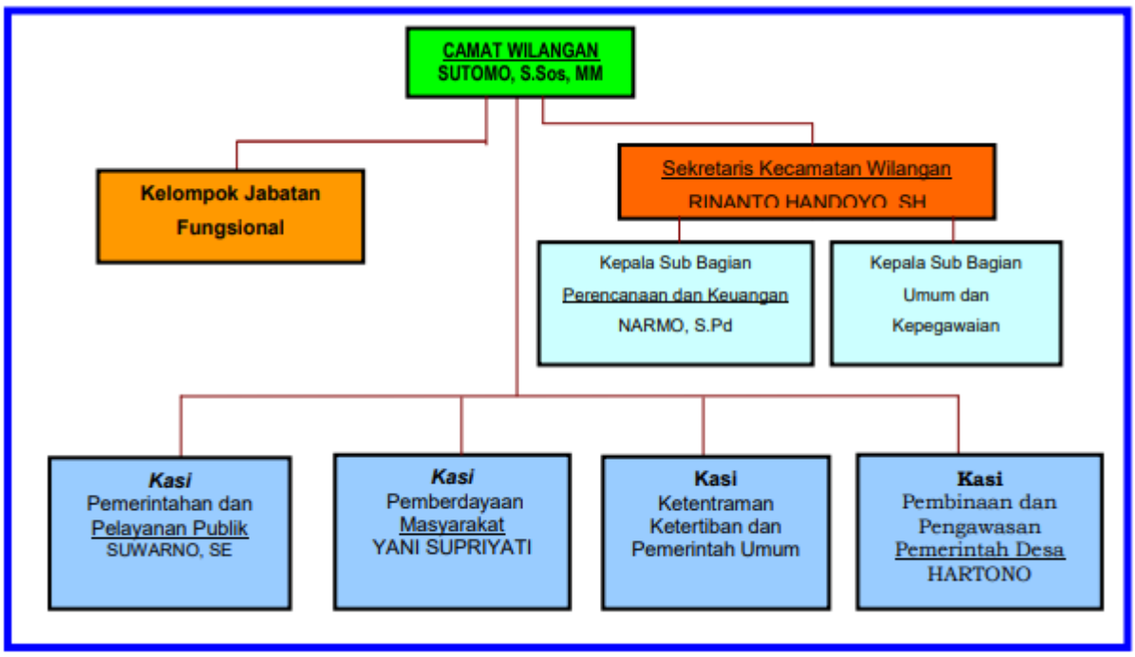
a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;

d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. StrukturOrganisasi

Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;

f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

a. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Umum;
b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah:

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikat terkait;
b. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa/ kelurahan;
e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan;
f. Melaksanakan evaluasi desa/kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintah Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Pemerintah Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintah Umum adalah:

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokok agama dan tokok masyarakat;
d. Melaksanakan kooordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara RI;
e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasioanal;
h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dan / kelurahan

Fungsi dari Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa adalah :

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepada desa;
g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa;
h. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. Melaksanakan fasilitasi penetapan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Sumber Daya Kecamatan Wilangan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Wilangan adalah sebagai berikut :

1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Wilangan sebanyak 8, yang terisi sebanyak 6 jabatan struktural yang belum terisi 1 Kasi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintah Umum dan 1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dibantu oleh 8 orang staf dan tenaga THL 8 Orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wilangan
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	3
4.	Kasubbag	1
5.	Staf/PNS	7
6.	THL	8
Jumlah		21

1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Wilangan sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wilangan
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/b	-
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	3
4.	Penata	III/c	3
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	-
6.	Penata Muda	III / a	2
7.	Pengatur Tk.I	II/d	3
8.	Pengatur	II/c	-
9.	Pengatur Muda	II/a	1
Jumlah			13

1.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Wilangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wilangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2022

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	1
2.	S1	6
3.	D3	1
4.	SMA	5
5.	SMP	0
	JUMLAH	13

2.3.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wilangan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wilangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Pubkik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.3.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wilangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

2.3.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk 2019-2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	98	90,55	90,55	98	98	98	98	98	90,55	95,66	-	-	-	92,39	97,61	-	-	-
2	Meningkatnya efektifitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	98	99,29	99,29	98	98	98	98	98	99,29	99,64	-	-	-	100,31	101,67	-	-	-
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	99,14	100	-	-	-	99,14	100	-	-	-
4	Meningkatnya efektifitaskoordinasi ketrentraman dan ketertiban umum	95	95,35	95,35	99	99	99	99	99	95,35	98,96	-	-	-	-	99,95	-	-	-
5	Meningkatnya sarana/prasarana layak fungsi	95	95,35	95,35	-	99	99	99	99	-	98,11	-	-	-	-	99,10	-	-	-
6	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	100	100	100	99	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk 2021-2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98	90,55	90,55	-	-	98	98	98	-	-	86,52			-	-	86,52		
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	98	99,29	99,29	-	-	99	99	99	-	-	36,80			-	-	36,80		
3	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	98	99,29	99,29	-	-	99	99	99	-	-	81,75			-	-	81,75		
4	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	98	99,29	99,29	-	-	99	99	99	-	-	6,46			-	-	6,46		
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98	99,29	99,29	-	-	99	99	99	-	-	34,54			-	-	34,54		
6	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98	99,29	99,29	-	-	99	99	99	-	-	4,93			-	-	4,93		

2.3.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/InternasionalYang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"**, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, (Perangkat Daerah) memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-2 serta sasaran strategis daerah Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan

a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Wilanganharus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
c. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
d. TuntutanPemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
e. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
f. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
g. Income perkapita masyarakat masih rendah.
h. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
i. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Wilangan

2) Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Wilangan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Wilanganuntuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Wilangandalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Wilangan;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Wilangan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Wilangan;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa;
i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Wilangan. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

2.3.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wilangan telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Wilangan, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk*

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur*. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan

secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

5) *Peningkatan* Tata *Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

2.3.3.6. Dampak Pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanyapandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angkakemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*,dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, padatahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 3.1
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
Periode Juni 2022



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu,berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif,termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. PandemiCovid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatannasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan

kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.3.3.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematikpembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten NganjukTahun 2023 adalah**"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Wilangan**			**2.031.713.350**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Wilangan**			**2.035.760.039**	
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**2.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD**	**100%**	**2.000.000**	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Wilangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.000.000	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**1.748.310.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**100%**	**1.748.310.000**	

2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wilangan	Jumlah dokumen laporan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Bulan	1.745.310.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wilangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.745.310.000	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wilangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	100%	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Wilangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	1.000.000	
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai**	**100%**	**7.500.000**	
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Wilangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	7.500.000	
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah pelaporan**	**100%**	**82.296.150**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Tersedianya kebutuhan**	**100%**	**83.019.400**	

			kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu					**administrasi umum SKPD**			
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	100%	982.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wilangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	982.400	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	12 bulan	34.243.500	Penyediaan Bahan Logistik	Kecamatan Wilangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	34.979.750	
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	2.000.250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Wilangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2.000.250	
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wilangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2 dokumen	2.500.000	

								Disediakan			
4.5	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wilangan	Jumlah pegawai yang di fasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten	12 bulan	42.570.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wilangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	42.557.000	
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**38.645.100**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**38.018.189**	
5.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pengadaan mebel Kantor	100%	8.529.300	Pengadaan Mebel	Kecamatan Wilangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	8.529.300	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	30.155.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wilangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	29.488.889	
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**29.220.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**29.220.000**	
6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Wilangan	Tersediaanya Jasa Surat Menyurat yang memadai	12 bulan	5.720.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Wilangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	5.720.000	

6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	23.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wilangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	23.500.000	
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**131.242.100**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah**	**100%**	**127.692.450**	
7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	100%	23.930.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Wilangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	23.925.800	
7.2.	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100%	3.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Wilangan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	3.451.500	

7.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	9.320.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wilangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	9.300.000	
7.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya honor thl arsip Terlaksananya honor thl aset Terlaksananya honor thl IT Terlaksananya honor thl kebersihan Terlaksananya honor thl penjaga malam Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	94.491.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wilangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	91.015.150	
B.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Wilangan**			**99.052.600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Wilangan**			**115.460.000**	
8.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**	**Kecamatan Wilangan**	**Tingkat Efektifitas Koordinasi Penyelengaraan**	**92%**	**69.667.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**	**Kecamatan Wilangan**	**Terkoordinirnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**	**92%**	**86.099.500**	

	Tingkat Kecamatan		**Pemerintahan Kecamatan**			**Tingkat Kecamatan**		**Tingkat Kecamatan**			
8.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya honor thl pelayanan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan Terlaksananya pembinaan optimilisasi pendapatan daerah	12 bulan	69.667.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wilangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	86.099.500	
9.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kecamatan Wilangan**	**Tingkat Efektifitas Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan**	**92%**	**13.537.800**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kecamatan Wilangan**	**Terkoordinirnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**92%**	**13.533.100**	
9.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	100%	13.537.800	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Wilangan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	13.533.100	
10.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**Kecamatan Wilangan**	**Tingkat Efektifitas**	**92%**	**15.847.800**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**Kecamatan Wilangan**	**Terkoordinirnya Penyelenggaraan**	**92%**	**15.827.400**	

	Dilimpahkan kepada Camat		**Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan**			**Dilimpahkan kepada Camat**		**Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			
10.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100%	15.847.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Wilangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	15.827.400	
C.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Wilangan**			**60.548.800**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Wilangan**			**56.550.300**	
11.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Wilangan**	**Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/kelurahan**	**100%**	**60.548.800**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Wilangan**	**Terkoordinirnya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**17.825.700**	
11.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat daam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%	17.830.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat daam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wilangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasayarakatan	17.825.700	
11.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan dan	100%	42.718.400	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	Kecamatan Wilangan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan	2 dokumen	38.724.600	

	dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Kesejahteraan Keluarga (PKK)			dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
D.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Wilangan**			**22.872.800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Wilangan**			**22.872.800**	
12.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Wilangan**	**Tingkat Efektifitas Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan**	**92%**	**22.872.800**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah koordinasi yang dilaksanakan**	**92%**	**22.872.800**	
12.1	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketenteraman dan ketertiban	100%	22.872.800	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	22.872.800	
E.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Wilangan**			**22.890.100**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Wilangan**			**22.890.100**	
13.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Tingkat Efektifitas Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahan**	**92%**	**22.890.100**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan**	**92%**	**22.890.100**	

			Kecamatan					**kebangsan**			
13.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Wilangan	Jumlah Kegiatan peringatan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	100%	22.890.100	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Wilangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	22.890.100	
F.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Wilangan**			**26.340.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Wilangan**			**86.391.000**	
14.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Wilangan**	**Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/kelurahan**	**100%**	**26.340.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Wilangan**	**Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**86.391.000**	
14.1	Fasilitasi Administrasi	Kecamatan	Terlaksananya	100%	6.930.000	Fasilitasi Administrasi	Kecamatan	Jumlah Dokumen	7	66.909.000	

	Tata Pemerintahan Desa	Wilangan	Pembinaan Pennyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan			Tata Pemerintahan Desa	Wilangan	yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen		
14.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wilangan	Terlkansanaya pembinaan penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa/kelurahan	100%	6.930.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wilangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	6.930.000	
14.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya pembinaan penyelenggaran pembangunan desa/kelurahan	100%	12.480.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wilangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 dokumen	12.480.000	
					2.263.417.650					2.339.852.239	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

2.3.3.8. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesiyang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2021

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema“**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah “…”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “…”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertosono

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2023**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	98
Meningkatnya efektifitas	Presentase	98

koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat. sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	98

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023sebagai berikut :

1. Meningkatkankesejahteraan keluarga,kesetaraan gender,pengendalian penduduk,dan efektifitas penanggulangankemiskinan;
2. Meningkatkan investasiserta produktivitas dan dayasaing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutupelayanan kesehatan bagisegenap lapisanmasyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas)Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

3.3.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan dengan target TPB/*SDG's*.

3.3.3. Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemiCovid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspeksosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat danmenurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasionalmasih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan polainteraksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi,sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntutpenggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisidemikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity*diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Wilangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Wilangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2.339.852.239**					**2.309.110.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.035.760.039**					**2.060.110.000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2.000.000**					**3.000.000**
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.000.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.748.310.000**					**1.749.310.000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penunjang Urusan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelaporan kinerja	Kab. Nganjuk. Wilangan.	100 %	14 Orang/ bulan	100 %	1.745.310.000	Dana Transfer Umum-		Tercapainya Penunjang Urusan	100 %	1.745.310.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.500.000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteSKPD	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.500.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7.500.000**					**7.500.000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	7.500.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**83.019.400**					**87.500.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	982.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yang Disediakan	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	34.979.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	36.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	2.000.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.500.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	42.557.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	45.000.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**38.018.189**					**44.500.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	8.529.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	9.500.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	29.488.889	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	35.000.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**29.220.000**					**31.000.000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	5.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	6.000.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber DayaAir dan Listrik	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	23.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	25.000.000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**127.692.450**					**137.300.000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	23.925.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Lapangan													
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	3.451.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	9.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	10.300.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	91.015.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	98.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**115.460.000**					**104.000.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**86.099.500**					**72.000.000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan DanPelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	86.099.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan DanPelayanan Publik	100 %	72.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Vertikal Terkait											
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**13.533.100**					**15.000.000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan DanPelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tingkat efektifitas koordinasipenyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	13.533.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan DanPelayanan Publik	100 %	15.000.000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**15.827.400**					**17.000.000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkaitdengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan DanPelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	15.827.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan DanPelayanan Publik	100 %	17.000.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**56.550.300**					**65.000.000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**56.550.300**					**65.000.000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Tingkat Efektifitas PembinaanDesa/Kelurahan	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	7 Lembaga	100 %	17.825.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Pembangunan di Desa											
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Tingkat Efektifitas PembinaanDesa/Kelurahan	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	38.724.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	45.000.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**22.872.800**					**25.000.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**22.872.800**					**25.000.000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tingkat Efektifitas Koordinasi Penyelengaraa nPemerintahan Kecamatan	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	22.872.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	25.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**22.890.100**					**25.000.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**22.890.100**					**25.000.000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	Tingkat efektifitas koordinasipeny	Kab. Nganjuk. Wilangan.	100 %	100 Orang	100 %	22.890.100	Dana Transfer Umum-		Tercapainya Penyelenggaraan Urusan	100 %	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					dalamrangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemerintahan Umum	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian BhinnekaTunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	elenggaraan pemerintahan kecamatan	Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Umum		
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**86.391.000**					**30.000.000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**86.391.000**					**30.000.000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa	Tercapainya PembinaanDan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tingkat Efektifitas PembinaanDesa/Kelurahan	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	100 %	66.909.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya PembinaanDan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	8.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya PembinaanDan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Efektifitas PembinaanDesa/Kelurahan	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	6.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya PembinaanDan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	8.000.000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tercapainya PembinaanDan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tingkat Efektifitas PembinaanDesa/Kelurahan	Kab. Nganjuk. Wilangan. Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	12.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya PembinaanDan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	14.000.000
TOTAL													**2.339.852.239**					**2.309.110.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan…

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi(2023)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik denganpemanfaatan teknologi informasi (e-gov).	21.796.639.810

Tabel 4.2
Sasaran Kecamatan Wilangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2023)	Alokasi (2023)	
				Program	Pagu Indikatif
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.041.250.900
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Presentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat. sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	98	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	115.460.000
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase Desa yang menerapkan		PROGRAM PEMBERDA	56.550.300

	desa yang baik	tata kelola pemerintahan yang baik		YAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.872.800
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.890.100
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	98	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	86.391.000

BAB V
PENUTUP

Rencana KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
   c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana KerjaPerangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI